



TAK ADA TITIK TEMU, MEDIASI PARTAI UMMAT DAN KPU BUNTU

Government (Hal.2)
Lagi-lagi KPK Jerat
Hakim MA, Diduga Terima
Suap Rp 3,7 M terkait
Kasasi Pailit RS

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar mediasi perdana antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Partai Ummat pada Senin (19/12/2022). Sayangnya, meski kedua belah pihak hadir tidak ada titik temu yang dihasilkan. Bahkan, mediasi yang dimulai sejak pukul 13.20 WIB hanya berlangsung kurang dari satu jam. Pertemuan kedua pun akan digelar Selasa (20/12/2022). Terkait isi dari pertemuan, semua pihak memilih bungkam karena sesuai kesepakatan pertemuan digelar tertutup. Mediasi maksimum berlangsung 2 hari. Jika mediasi gagal, maka sengketa ini berlanjut ke meja hijau. Lalu, peserta/calon peserta pemilu yang kalah dalam persidangan sengketa di Bawaslu masih akan memiliki hak banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Makin panas saja suhu politik jelang 2024.

(Baca Hal 11)



Lagi-lagi KPK Jerat Hakim MA, Diduga Terima Suap Rp 3,7 M terkait Kasasi Pailit RS

JAKARTA - Makin panjang daftar hakim Mahkamah Agung (MA) yang terseret kasus dugaan korupsi. Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membongkar kasus terkait vonis kasasi pailit Yayasan Rumah Sakit. Dalam kasus itu, KPK menjerat Edy Wibowo (Hakim Yustisial/Panitera Pengganti) sebagai tersangka penerima suap.

"KPK kembali menemukan adanya kecukupan alat bukti terkait dugaan perbuatan pidana lain dalam pengurusan perkara di MA. Langkah berikutnya yaitu KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan Tersangka EW (Edy Wibowo, tidak dibacakan), Hakim Yustisial / Panitera Pengganti Mahkamah Agung," kata Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam konferensi pers, Senin (19/12/2022).

Edy Wibowo diduga menerima suap pengaturannya vonis kasasi. Diduga, ia melakukannya bersama Muhajir Habibie (PNS pada MA) dan Albasri (PNS pada MA). Edy Wibowo langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan. Muhajir dan Albasri sudah dijerat sebagai tersangka dalam perkara lain di MA. Keduanya pun telah ditahan.

Edy Wibowo bersama dengan Muhajir Habibie dan Albasri dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a dan b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kasus ini berawal adanya gugatan PKPU (Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang) ke Pengadilan Negeri Makassar pada Februari 2022. Pemohon ialah PT Mulya Husada Jaya, Termohon ialah Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar. Isi gugatan tersebut ialah agar hakim menetapkan Yayasan RS Sandi Karsa Makassar dalam PKPU.

Dalam vonis yang dibacakan pada Mei 2022, hakim mengabulkannya. Hakim menyatakan Yayasan RS Sandi Karsa Makassar pailit. Pihak yayasan kemudian mengajukan kasasi ke MA. Salah satu isi permohonannya agar Yayasan RS Sandi Karsa Makassar tidak dinyatakan pailit.

Pada Agustus 2022, Wahyudi Hardi selaku ketua yayasan diduga melakukan pendekatan dan komunikasi intens dengan Muhajir Habibie dan Albasri yang juga PNS MA. Keduanya diminta membantu dan memonitor serta mengawal proses kasasi agar dikabulkan. "Diduga disertai adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang," ujar Firli.

Pemberian uang kemudian dilakukan. Termasuk kepada Edy Wibowo. "Sebagai tanda jadi kesepakatan, diduga ada pemberian sejumlah uang secara bertahap hingga mencapai sekitar Rp 3,7 miliar kepada EW yang menjabat Hakim Yustisial sekaligus Panitera Pengganti MA yang diterima melalui MH dan AB sebagai perwakilan sekaligus orang kepercayaan," papar Firli.

KPK menduga serah terima uang sudah dilakukan selama proses kasasi di MA. Diduga, pemberian uang itu ialah untuk mempengaruhi isi putusan agar kasasi dikabulkan. "Setelah uang diberikan, maka putusan kasasi yang diinginkan Wahyudi Hardi dikabulkan dan isi putusan menyatakan Rumah Sakit SKM tidak dinyatakan pailit," papar Firli.



Merujuk situs MA, putusan kasasi itu diketok pada 14 September 2022. Perkara tercatat dengan nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Ketua Majelis kasasi itu ialah Takdir Rahmadi dengan hakim anggota Nurul Elmiyah dan Rahmi Mulyati. Sementara Panitera Pengganti ialah Edy Wibowo.

Belum ada pernyataan dari Yayasan RS Sandi Karsa Makassar maupun Wahyudi Hardi terkait kasus ini.

Momentum Bersihkan 'Markus'

Terpisah, Mantan Menteri Kehakiman dan HAM sekaligus pengamat hukum, Yusril Ihza Mahendra menyatakan dukungannya kepada Ketua MA, M Syarifuddin, yang bertekad untuk memberantas makelar kasus (markus) dan menegakkan kembali citra MA sebagai badan peradilan tertinggi di negara ini. Yusril yang sekarang menjadi advokat mengakui citra MA kini merosot tajam dengan munculnya putusan-putusan kontroversial dengan pertimbangan hukum yang ala kadarnya.

Pertimbangan hukum putusan MA, kata Yusril, mestinya mendalam dan penuh nilai akademis dan filosofis sehingga menjadi bahan renungan dan rujukan.

"Saya kadang-kadang merumuskan argumentasi perkara menggunakan kerangka berpikir filsafat hukum dan teori ilmu hukum puluhan halaman. Tetapi dijawab dengan putusan dengan pertimbangan hukum dua tiga halaman yang sangat jauh dari kedalaman," kata Yusril, seperti dilansir pada Senin (19/12/2022).

Yusril adalah Menteri Kehakiman dan HAM RI yang menangani pembaruan badan peradilan di awal Reformasi. Dia melakukan upaya memisahkan kewenangan pemerintah dalam menangani administrasi, keuangan dan personil pengadilan

yang sejak awal kemerdekaan berada di tangan Kementerian Kehakiman, menjadi sepenuhnya kewenangan MA.

Pemerintah dulu menangani urusan administrasi, keuangan dan personel dengan maksud agar pengadilan fokus menangani perkara (yustisial), sehingga tidak direpotkan dengan urusan-urusan lain. Tetapi Pemerintah justru dianggap campurtangan urusan pengadilan, sehingga kewenangan itu dilepaskan oleh Pemerintah.

"Kini setelah dilepaskan, kenyataannya pengadilan tidak menjadi lebih baik. Menunggu salinan resmi putusan saja perlu waktu berbulan-bulan bahkan tahunan. Ini membuka peluang terjadinya pungli untuk mempercepat hal-hal yang bersifat administratif," kata dia.

Maraknya makelar kasus, kata Yusril, juga karena disebabkan rendahnya integritas moral para pegawai dan para hakim sendiri. Pegawai biasanya menjadi perantara untuk memuluskan keinginan pihak-pihak yang berperkara.

Hakim yang lemah integritasnya, kata dia, mudah sekali tergoda untuk memenangkan keinginan "Karena itu, saya berpendapat, langkah Ketua MA M Syarifuddin untuk memberantas markus pantas didukung semua pihak. Kontrol internal terhadap jalannya peradilan memang harus ditingkatkan. Begitu juga kontrol eksternal dari Komisi Yudisial yang mengawasi etik dan perilaku hakim perlu ditingkatkan. Hal lain yang sangat perlu diperhatikan adalah rekrutmen, mutasi dan promosi jabatan hakim. Ini sepenuhnya kewenangan MA. Kalau rekrutmen, mutasi dan promosi hakim sudah sarat dengan suap-suyup, jangan kita berharap pengadilan kita akan menjadi lebih baik," ujarnya. (wid,ist,ant,rls/dya)

DAFTAR PANJANG KASUS SUAP DI MA

SUAP TERKAIT VONIS KASASI KOPERASI INTIDANA

- Berawal dari OTT KPK pada 21 September di Semarang dan Jakarta. KPK menduga terjadi transaksi suap pengurusan perkara di MA. Pada saat OTT 21 September, bukti yang didapatkan KPK ialah SGD 205 ribu dan Rp 50 juta. Sementara suap agar dinyatakan pailit diduga sebesar SGD 202 ribu atau sekitar Rp 2,2 miliar.

- Berikut daftar tersangka awal kasus penanganan perkara di MA:

1. **Sudrajad Dimiyati (SD)** merupakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung
2. **Ely Tri Pangestu (ETP)** merupakan Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung
3. **Desy Yustria (DY)** merupakan PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
4. **Muhajir Habibie (MH)** merupakan PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
5. **Nurmanto Akmal (NA)** merupakan PNS Mahkamah Agung
6. **Albasri (AB)** merupakan PNS Mahkamah Agung
7. **Yosep Parera (YP)** merupakan pengacara
8. **Eko Suparno (ES)** merupakan pengacara
9. **Heryanto Tanaka (HT)** merupakan swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana
10. **Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS)** merupakan swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana

SUAP TERKAIT PENGURUSAN KASASI TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA

- Kasus ini diduga melibatkan Hakim Agung Gazalba Saleh.
- Terkait pengurusan kasasi tindak pidana pemalsuan akta dengan terdakwa Budiman Gandi Suparman selaku pengurus Koperasi Intidana. Budiman diperkarakan oleh Heryanto Tanaka selaku debitur koperasi yang menunjuk Yosep Parera dan Eko Suparno selaku pengacara.
- Pengadilan Negeri Semarang menyatakan Budiman tidak terbukti bersalah dan divonis bebas. Jaksa kemudian mengajukan kasasi. Heryanto Tanaka dkk diduga memberikan suap untuk memastikan kasasi dikabulkan.
- Dalam putusan pada 5 April 2022, MA mengabulkan kasasi tersebut. Budiman dinyatakan bersalah dengan hukuman 5 tahun penjara. Merujuk situs MA, majelis kasasi itu ialah Sri Murwahyuni sebagai Ketua dan Gazalba Saleh serta Prim Haryadi sebagai anggota.
- Kasus Gazalba Saleh ini diduga masih terkait dengan kasus Sudrajad Dimiyati. Sebab, tersangka pemberi suap merupakan pihak yang sama.



Total Subsidi Haji Capai Rp 4,7 Triliun, DPR RI Minta Dikaji Lagi

JAKARTA - Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan kembali konsep istitha'ah (kemampuan) yang menjadi syarat haji. Peralpnya, saat ini dana subsidi mencapai Rp 46,9 juta per jemaah, atau secara keseluruhan lebih dari Rp 4,7 triliun setiap musim haji.

"Rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 M per jamaah haji reguler sebesar Rp 86.5 juta. Biaya yang dibayar langsung jamaah haji, rata-rata sebesar Rp39,6 juta," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, TB. Ace Hasan Syadzily dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/12/2022).

Dia mengingatkan konsep istitha'ah yang mencakup kemampuan secara fisik (kesehatan) dan juga material (biaya haji). "Artinya, lebih dari 50 persen biaya perjalanan haji masyarakat, 'disubsidi' dari nilai manfaat optimalisasi keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH," lanjutnya.

Dana subsidi tersebut untuk membayar komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan di dalam negeri. Selain itu, lanjut Ace, jamaah haji lunas tunda pada tahun 1441H/2020M juga tidak dibebani tambahan biaya pelunasan BPIH tahun 1443H/2022M.

Selisih kurang antara BPIH 1443H/2022M dengan BPIH 1441H/2020M, juga dibebankan ke nilai manfaat keuangan haji. "DPR dan pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji. Pada tahun 1443H/2022M misalnya, telah dilakukan peningkatan volume makan jamaah haji di Makkah dan Madinah dari 2 (dua) kali per hari menjadi 3 (tiga) kali per hari," pungkas Ace.

Kemenag Pastikan Tetap Ada

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief memastikan tidak ada pengurangan subsidi biaya haji tahun 2023. Subsidi haji hanya ditinjau kembali.

"Kita sepakat bahwa haji itu diwajibkan bagi orang-orang yang mampu. Kami sudah mendiskusikan dengan berbagai pihak untuk memaknai istitha'ah memang harus mampu secara fisik, kesehatan, finansial, politik dan lain sebagainya," kata Hilman Latief di Jakarta, Senin (19/12/2022).

Dia pun menegaskan subsidi haji tahun 2023 tak dihapus melainkan dilakukan penyesuaian Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Penyesuaian diperlukan seiring terus membesarnya penggunaan nilai manfaat dana operasional haji. "Jadi bukan masalah dihilangkan. Kalau dihilangkan subsidi sama sekali, tidak usah ada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ngapain," tuturnya.

Lebih lanjut, Kemenag tengah

merumuskan kebijakan keuangan haji yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pemangkasan subsidi dana haji masih dalam pembahasan tentang berapa persen subsidi yang akan dipotong. "Saya sepakat bahwa harga harus ditinjau ulang, mau enggak mau harus ditinjau ulang. Kemarin itu sampai 40 persen jemaah, subsidinya 60 persen, kita ingin keseimbangan yang profesional," ujarnya.

Namun, Hilman belum mengetahui berapa biaya haji dan subsidi yang akan diberikan negara untuk tahun 2023. Sebab, Arab Saudi belum menetapkan biaya masyair, yaitu biaya untuk pelayanan dari Saudi selama puncak haji di Arafah, Muzdalifah, Mina.

Pada tahun ini, biaya masyair dinaikkan Arab Saudi secara sepihak dan tiba-tiba mencapai Rp 1,46 triliun. Angka itu akhirnya dibayarkan Kemenag setelah disetujui DPR.

"Kita simulasikan kenapa saya belum bisa menyebut angka wong harga di Saudi belum muncul. Saat ini banyak masukkan juga dari pemerintah Arab Saudi mengenai biaya masyair yang tinggi sekarang dia sedang penyesuaian dalam waktu dekat akan ada ketentuan harga dasar berapa jadi tim kan sebagian di sana nanti kalau sudah ada sudah muncul biaya masyair berapa baru kita simulasikan dengan jelas," beber Hilman.

Di sisi lain yang perlu diketahui, dana haji yang terkumpul dari masyarakat yang antre melaksanakan ibadah haji jumlahnya sangat besar. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyebutkan besaran dana haji yang dikelola per akhir pekan lalu mencapai Rp169 triliun. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring semangat umat muslim Indonesia menunaikan rukun Islam tersebut.

"Uang tersebut diinvestasikan



(Ilustrasi) Pelayanan haji 2022 menurut survei BPS sangat memuaskan jemaah. (Foto-dokant)

secara syariah, aman, dan penuh kehati-hatian. Kami selalu dikawal oleh Komisi VIII DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander di Pariaman, Sumatera Barat Minggu (11/12/2022).

Ia mengatakan karena BPIH diawasi maka investasi yang dilakukan harus yang terbaik sehingga tidak saja aman, namun juga memberikan nilai manfaat yang besar. Menurut dia, dengan nilai manfaat tersebut tidak saja dapat mensubsidi keberangkatan haji namun juga dapat membantu peningkatan pendidikan, agama dan kesehatan. Bahkan dengan nilai manfaat itu pihaknya dapat mengurangi biaya akomodasi pelaksanaan haji dengan pembangunan rumah Indonesia di Makkah.

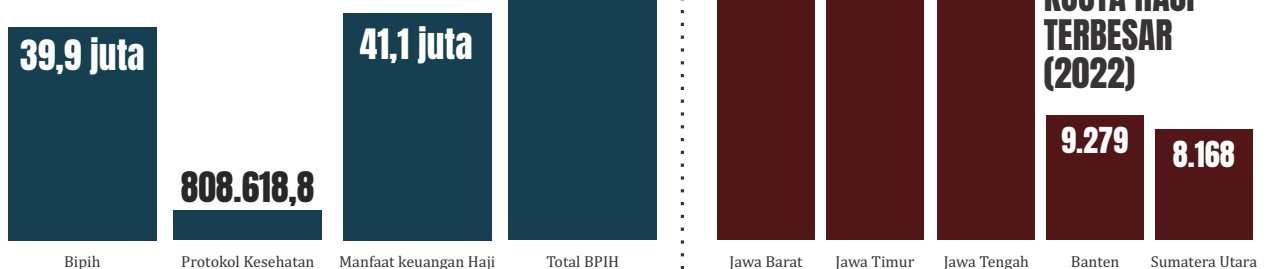
Ia menyampaikan apresiasi calon jamaah haji di Indonesia yang terus mendaftar untuk keberangkatan haji

meskipun saat ini dilanda pandemi COVID-19. "Per hari ini saja pendaftar haji sudah 290 ribu jemaah. Jadi jamaah haji optimis berangkat," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis memastikan dana haji yang dikelola oleh BPKH aman karena pengelolaannya dilakukan secara profesional. "Dana tunai atau uang yang dapat dicairkan sewaktu-waktu sebanyak 4 kali kebutuhan biaya satu kali keberangkatan haji," kata dia.

Ia mengatakan tidak semua dana haji yang terkumpul dari calon jamaah diinvestasikan karena untuk kebutuhan sewaktu-waktu BPKH menyiapkan dana siap pakai sebanyak empat kali kebutuhan keberangkatan. Selain itu, lanjutnya setiap bulan BPKH melaporkan uang haji yang dikelola kepada DPR RI bahkan badan tersebut juga diperiksa oleh BPK RI. (wid,rls,ist/dya)

RINCIAN BIAYA PENYELENGGARAAN HAJI (BPIH) 1443 H / 2022 M



5 WILAYAH DENGAN KOUTA HAJI TERBESAR (2022)

Menjelang Tahun Baru, Harga Telur Ikut Baru



(Ilustrasi) Kenaikan harga telur menjelang Natal 2022 dan tahun baru 2023 terus terjadi

JAKARTA – Menjelang Natal dan Tahun Baru 2023, seakan harga beberapa komoditas termasuk telur ikut ikutan baru. Betapa tidak, belakangan ini harga telur terus naik dan menunjukkan harga baru. Bahkan, harga telur di Maluku Utara menembus Rp 47.500 per kg.

Kenaikan harga telur ini tak luput dari perhatian pemerintah. Bahkan, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan melaporkan perkembangan harga sejumlah komoditas pokok menjelang akhir tahun ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) Senin (19/12/2022). Dia menyebutkan bahwa pada Desember ini, beberapa komoditas yang diwaspadai akan mengalami kenaikan permintaan yang berdampak pula pada kenaikan harga.

"Telur ini kan banyak orang bikin kue, permintaannya naik. Harganya seharusnya Rp 27 ribu sampai Rp 29 ribu, sekarang sudah Rp 31 ribu," kata Mendag yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini usai rapat persiapan akhir tahun bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, dilansir dari tempo.co, Senin (19/12/2022).

Pemerintah akan menanggung ongkos distribusi telur untuk meneruskan harga komoditas di pasar menjelang Natal dan tahun baru atau Nataru. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah menggelar rapat dengan Menteri Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk membahas kebijakan ongkos distribusi tersebut.

"Kalau (harga) sudah lebih dari 5 persen, dibantu biaya transportasi agar harganya tidak lebih dari Rp 31 ribu sampai Rp 32 ribu," kata Zulkifli Hasan. Ongkos transportasi

yang akan ditanggung adalah pengiriman dari Pulau Jawa. "Ngambil dari Jawa untuk Kalimantan ongkos transportasinya ditanggung," imbuh Zulkifli.

Harga telur berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP) mencapai Rp 31.500 per kilogram. Angka ini lebih tinggi dari harga normal yang berkisar Rp 27 ribu sampai Rp 29 ribu.

Adapun tingginya permintaan telur tersebut oleh banyaknya pedagang hingga masyarakat yang membuat kue menjelang Natal. Zulkifli menuturkan kenaikan harga telur ayam perlu diwaspadai. Sebab, telur menjadi komoditas pendorong inflasi.

Katadata.co.id menyebutkan bahwa Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat rata-rata harga telur ayam (per kg) harian di pasar modern di beberapa provinsi telah menyentuh angka Rp 32,46 ribu per kg, data per Jumat (16/12/2022). Secara keseluruhan, rata-rata minggu ini naik dibandingkan rata-rata minggu sebelumnya yang tercatat Rp. 31,48 ribu per kg.

Harga telur ayam harian di pasar modern Maluku Utara menjadi yang termahal se-Indonesia dengan harga jual Rp 47.500 per kg. Dibandingkan sebulan lalu, harga telur ayam di provinsi ini tidak mengalami perubahan. Harga jual tertinggi yang pernah dicatat di wilayah ini adalah Rp. 47.500 per kg.

Sementara di pasar modern Papua Barat, harga telur ayam dijual seharga Rp 42.400 per kg dan menjadi yang

termahal kedua di dalam negeri. Kemudian di urutan ketiga, harga telur ayam di Nusa Tenggara Timur seharga Rp 41.300 per kg, Gorontalo Rp 37.300 per kg, dan Sulawesi Tengah Rp 37.200 per kg.

Sementara itu, terdapat 19 provinsi dengan penjualan harga telur ayam di bawah rata-rata nasional. Tiga provinsi dengan harga jual telur ayam terendah adalah Jambi, Aceh dan Kep. Bangka Belitung.

Sama seperti telur, harga sayur mayur juga naik di periode Natal dan tahun baru tetapi kenaikannya masih ditoleransi. "Karena kebutuhan sayur mayur naik meningkat saat Natal-tahun baru, harganya juga naik, tapi ini musiman karena Natal saja, nanti angka keperluannya akan landai lagi," ujar Zulhas.

Hati-hati, di samping itu, harga kedelai juga naik karena ada impor yang terhambat pada Desember 2022. Namun, harga kedelai diharapkan dapat kembali normal pada Januari 2023. "Harusnya impor masuk Desember ini Bulog, tapi terlambat karena ada satu urusan izin belum selesai. Mudah-mudahan Januari nanti bisa selesai sehingga kedelai itu bisa harganya Rp 10.500 paling mahal Rp 11.000 (per kilogram)," kata Zulhas dikutip dari Republika.com.

Ia juga mengatakan, harga ayam di pasaran masih stabil sedangkan pemerintah mengupayakan stok beras tersedia di harga Rp 9.450 per kilogram lewat impor beras.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada November 2022 mencapai 0,09 persen ketimbang bulan sebelumnya. Inflasi disumbang oleh kenaikan harga telur ayam ras dengan andil 0,02 persen.

Harga telur ayam ras memiliki andil tertinggi dalam inflasi November 2022 secara bulanan, yang disebabkan peningkatan permintaan. Harga telur ayam ras naik 2,77 persen secara bulanan dan 17,11 persen secara tahunan menjadi rata-rata Rp 27.476 per kilogram.

Diklaim Aman

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebelumnya tak menampik harga telur ayam kini masih tinggi menembus Rp 31 ribu per kilogram. Namun,

menurutnya, harga tersebut akan segera turun sesuai Nataru.

"Selepas Nataru, harganya akan jatuh lagi. Jadi ada satu waktu di mana pasokan di peternak bisa lebih, ada satu waktu harganya jatuh," ujarnya saat ditemui Tempo di Jakarta Utara pada Jumat, 16 Oktober 2022.

Dia menilai harga telur masih relatif stabil lantaran tak terlalu jauh dari harga acuan pembelian (HAP)--Rp 27 ribu per kilogram. Arief menjelaskan harga telur di peternakan kini berkisar Rp 27 ribu per kilogram. Kemudian pedagang menjual ke konsumen dengan keuntungan sekitar Rp 4.000 sampai Rp 5.000 per kilogram.

Untuk mencegah agar fluktuasi harga telur tak terlalu tinggi, Bapanas akan terus berdialog dengan peternak layer. Dia berharap harga telur di peternakan segera turun menjadi Rp 24-25 ribu per kilogram. Sehingga, harga di konsumen dapat kembali mendekati HAP yang telah ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, kenaikan harga telur ini cukup menguntungkan bagi peternak ayam petelur. Seperti yang diungkapkan Muhammad Sutrisno, peternak ayam petelur asal Desa Glagahan, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Dikutip dari Radar Jombang, dia mengatakan tak heran dengan lonjakan harga telur. Selain bersamaan momentum jelang Natal dan tahun baru, paroduktivitas telur saat musim penghujan juga menurun. "Kalau Natal dan tahun baru banyak kegiatan, sehingga permintaan telur meningkat. Selain itu, produktivitas ayam petelur menurun kalau musim penghujan seperti ini," terangnya.

Kenaikan harga ini sudah berlangsung tiga minggu terakhir. Sutrisno memaparkan, dari tingkat peternak, harga telur ayam broiler dibanderol Rp 26 ribu per kilogram. Sementara harga di tingkat agen dan penjual eceran tentunya lebih tinggi. "Sudah tinggi dari harga normal biasanya Rp 21 ribu hingga Rp 22 ribu per kilogramnya," terangnya.

Sementara setiap harinya, Sutrisno mampu memanen 80 kilogram telur dari ratusan ekor ayam di kandangnya. Bahkan dia memprediksi bahwa harga telur akan terus naik dan puncaknya adalah minggu depan. "Kalau masih momen Natal dan tahun baru mungkin masih bertahan harga telur ayam. Bisa jadi nanti ini turun, tapi minggu depan naik lagi. Biasanya begitu, tapi kalau telur itu memang sulit untuk diprediksi," jelasnya.

Tingginya permintaan telur berdampak pada omzetnya. "Biasanya per bulan meraup omzet Rp 50 juta sampai Rp 60 juta, sekarang Alhamdulillah naik jadi Rp 80 juta," pungkasnya. (lut/dya)

KPK Kembali Geledah DPRD Jatim, Bawa 4 Koper Hitam

SURABAYA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pengeledahan di kantor DPRD Provinsi Jawa Timur di Jalan Indrapura Surabaya, Senin (19/12/2022). Pengeledahan yang dilakukan sejak pukul 15.00 WIB ini dilakukan di beberapa ruangan staf hingga Sekretaris DPRD Jatim.

Pengeledahan oleh KPK ini diduga masih berkaitan dengan kasus suap yang menyeret Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak dan tiga orang lainnya sebagai tersangka. KPK yang Kantor DPRD Jatim sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka menggunakan minibus warna hitam dikawal aparat kepolisian ini diduga mencari bukti tambahan atas kasus tersebut.

Hingga pukul 21.00 WIB, tim penyidik dari KPK ini masih melakukan pengeledahan di beberapa ruangan di DPRD Jatim. Selain ruang staf, KPK juga menggeledah beberapa ruang Fraksi dan ruang komisi DPRD Jatim.

Tiga orang penyidik lembaga antirasuah ini juga menggiring seorang pria berpakaian ASN yang diduga berinisial A. Mereka keluar dari pintu belakang gedung DPRD Jatim menuju parkir depan gedung DPRD Jatim. ASN tersebut menenteng menenteng sebuah tas berwarna hitam, yang belum diketahuinya.

Setelah sampai parkir, nampak A bersama tiga petugas KPK memindahkan mobil Toyota Avanza berwarna silver dengan nopol L 777 EM ke parkir VIP belakang, setelah itu keempatnya kembali masuk ke dalam kantor DPRD Jatim kemudian kembali melakukan pemeriksaan di beberapa ruangan.

Akhirnya, sekitar pukul 22.00 WIB KPK meninggalkan gedung DPRD Jatim. Mereka membawa empat koper berwarna hitam dari lantai dua gedung wakil rakyat itu. Dari empat koper tersebut, tiga di antaranya dibawa petugas laki-laki dari lantai dua, dan keluar dari pintu depan. Sedangkan satu koper lainnya dibawa petugas perempuan yang keluar melalui pintu samping.

Dilansir dari jatimnow.com, sejumlah polisi berseragam hitam membawa senjata laras panjang juga berjaga di samping tangga, tempat KPK turun. Disatu sisi, ASN yang diduga berinisial A nampak keluar melalui pintu belakang ke parkir VIP kantor DPRD Jatim. Saat keluar, dia masih mengenakan pakaian dinas ASN-nya.

Tak ada komentar apapun yang dikeluarkan A, saat keluar dari pintu belakang kantor DPRD Jatim. Dia juga sempat memasukkan sesuatu ke bagasi mobilnya. Dengan santai, ia keluar dari Gedung DPRD Jatim mengendarai mobil Toyota Avanza berwarna silver bernopol L 777 EM, seiring dengan mobil-mobil KPK



Untuk ketiga kalinya KPK melakukan pengeledahan di Gedung DPRD Jatim Jalan Indrapura Surabaya, Senin (19/12/2022).

keluar. Terlihat bahwa A duduk di belakang mobil yang dikemudikan salah satu anggota KPK. Kemudian, anggota KPK turut bubar dari gedung DPRD Jatim mengendarai tujuh mobil Toyota Innova warna hitam.

Sebelumnya, KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua P Simandjuntak dan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Mereka terjerat kasus suap pengelolaan alokasi dana hibah yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur.

Dalam kasus ini, KPK menyita uang sekitar Rp 1 miliar berupa pecahan uang rupiah dan uang asing. Selain itu juga mengamankan beberapa barang bukti lainnya, seperti dokumen dan rekaman CCTV.

Ketiga tersangka lainnya, selain Sahat adalah: Staf Ahli Sahat bernama Rusdi; Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas) Abdul Hamid; dan Koordinator lapangan Pokmas, Ilham Wahyudi alias Eeng. Mereka pun langsung menjalani penahanan.

“Tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023,” ujar Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis tengah malam (15/12/2022).

KPK menahan Sahat Tua P Simanjuntak di Rumah Tahanan (Rutan) KPK di Pomdam Jaya Guntur, sementara Ilham ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Dua tersangka lainnya ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1 Gedung ACLC.

Johanis menerangkan, operasi tangkap tangan itu dilakukan pada Rabu (14/12/2022), pukul 20.30 WIB. Awalnya, KPK menerima laporan akan

adanya penyerahan sejumlah uang dari Ilham Wahyudi kepada Rusdi di sebuah mal di kawasan Surabaya, Jawa Timur. Uang itu disebut terkait pengelolaan alokasi dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2023 dan 2024.

Tim KPK lalu menangkap Rusdi dan Sahat yang tengah berada di gedung DPRD Jawa Timur, sementara Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi ditangkap di kediamannya masing-masing di Kabupaten Sampang.

“Turut pula diamankan uang tunai dalam bentuk pecahan mata uang rupiah dan uang asing berupa dolar Singapura dan dolar Amerika dengan jumlah total sekitar Rp 1 miliar,” kata Johanis Tanak.

Menurut dia uang tersebut merupakan pembayaran dimuka (ijon) agar Pokmas yang dikoordinir oleh Abdul Hamid mendapatkan dana hibah dari APBD Jawa Timur tahun 2023 dan 2024.

Pada Kamis kemarin (15/12/2022), penyidik KPK juga telah menyegel ruang kerja Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yang biasa ditempati Sahat. Selain itu Ruang Subbagian Rapat dan Risaalah, ruangan salah satu Kasubbag DPRD Jatim, dan ruang CCTV juga ikut disegel.

Pantauan di Kantor DPRD Jatim, tampak petugas sepanjang hari ini fokus menggeledah ruang CCTV. Penyelidikan di ruang CCTV itu berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga siang sekitar pukul 14.00 WIB.

“Tadi petugas KPK mintanya ke ruang CCTV, ya saya tunjukkan ruangan ini,” kata seorang petugas DPRD Jatim Suwaji saat dikonfirmasi usai mendampingi penyelidikan petugas KPK di Ruang CCTV DPRD Jatim.

Menurut dia, petugas KPK fokus pada rekaman CCTV tanggal 13-14

Desember 2022. “File CCTV-nya tidak dikopi. Hanya direkam oleh petugas KPK,” ujarnya.

KPK pun menjerat Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sementara Sahat Tua Simanjuntak dan Rusdi dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b juncto Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (lut/dya).



Tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 3 Januari 2023,”

JOHANIS TANAK
Wakil Ketua KPK





FAJAR NUGROS

Sutradara dan Produser “Balada Si Roy”

Foto - Foto : Berbagai Sumber

SUTRADARA Fajar Nugros dan Head of IDN Pictures sekaligus produser Susanti Dewi mengungkapkan salah satu tantangan terbesar dalam pembuatan film "Balada Si Roy" adalah melibatkan hewan yaitu anjing saat proses syuting.

"Di novel aslinya, tahun 80-an anjing belum menjadi problem. Jadi keluarga muslim punya anjing itu biasa," ungkap Fajar saat dijumpai di Epicentrum XXI, belum lama ini.

"Ketika film ini rilis tahun 2023 dan orang mulai bertanya, keluarga muslim punya anjing emang boleh? Apalagi pemainnya anak ustadz. Jadi saya harus mempelajari dan memberi perubahan terhadap source aslinya bahwa anjing di film ini ditugaskan

untuk menjaga rumah," tambahnya.

Lebih lanjut, Fajar menceritakan bahwa saat itu pihaknya juga didampingi oleh tim dari sekolah anjing. Sebab kala itu, mereka memilih untuk menggunakan anjing dari sekolah anjing daripada anjing polisi.

Fajar menjelaskan pemilihan anjing ini disebabkan karena anjing polisi dilatih untuk menggigit dan memiliki naluri untuk menyerang.

Hal sulit lainnya adalah ketika Fajar beserta timnya harus menunggu anjing tersebut siap untuk menjalani syuting.

Di sisi lain, Susanti Dewi juga menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, syuting dengan hewan

merupakan sebuah tantangan yang cukup rumit apalagi anjing ini dapat dikategorikan salah satu talenta utama dalam syuting "Balada Si Roy".

"Rasanya syuting dengan melibatkan hewan itu rasanya another level of challenge," tutupnya.

Profil Fajar Nugroho

Fajar Nugros merupakan salah satu sutradara di Indonesia yang telah banyak melahirkan karya dan meraih banyak penghargaan dari karya-karyanya tersebut.

Sutradara film Srimulat Hil yang Mustahal ini dikenal sebagai sutradara yang pandai membuat film bergenre drama komedi.

Fajar Nugroho atau yang lebih dikenal dengan nama Fajar Nugros lahir di Yogyakarta pada 29 Juli 1979. Selain tertarik di dunia film, Fajar Nugros telah lebih dulu menggeluti dunia tulis menulis sedari masih duduk di bangku sekolah dasar.

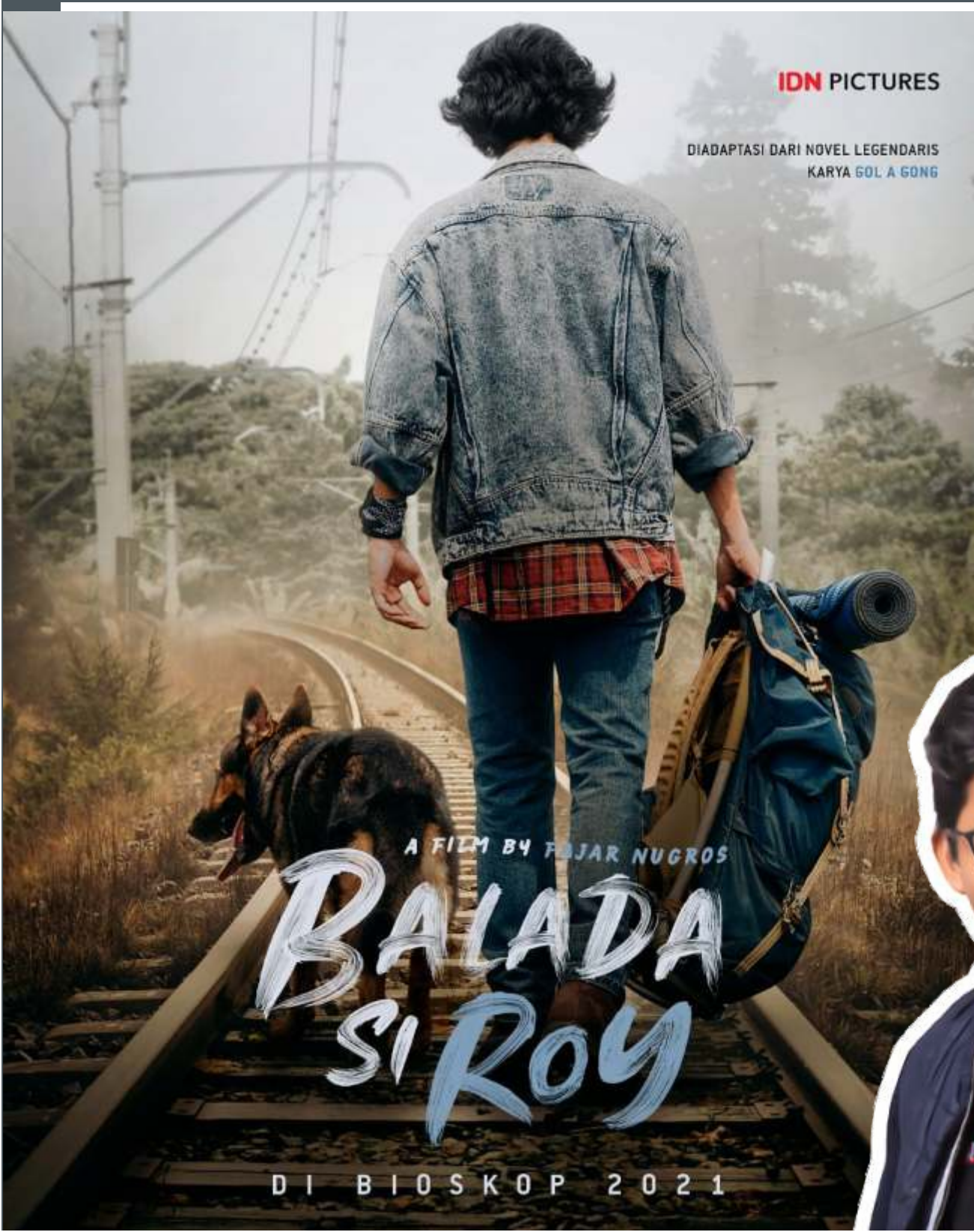
Fajar Nugros pun aktif mengirim cerita pendek ke sebuah surat kabar dan mengikuti lembaga pers semasa duduk di bangku SMA dan perguruan tinggi.

Keinginannya membuat film sendiri semakin besar setelah ia melihat film Iffa Isfanyah berjudul Air Mata Surga. Ia kemudian mulai membuat film pendek dengan alat seadanya.

Fajar Nugros sempat membuat beberapa film dokumenter dan diikuti dalam ajang Eagle Awards Metro TV. Ia juga pernah mendapatkan penghargaan Festival Film Bandung sebagai Sutradara Terpuji berkat film Adriana yang digarap pada tahun 2013. (Berbagai Sumber)

● ● ●
BERIKUT DAFTAR FILM KARYA FAJAR NUGROS LAINNYA

- Cinta 2 Hati (2010)
- Tendangan dari Langit (2011)
- Cinta di Saku Celana (2012)
- Adriana (2013)
- 9 Summers 10 Auntums (2013)
- Cinta Brontosaurus (2013)
- Refrain (2013)
- Bajaj Bajjuri The Movie (2014)
- Me & You vs The World (2014)
- Cinta Selamanya (2015)
- Terbang: Menembus Langit (2018)
- Generai Micin (2018)
- Yowis Ben (2018)
- Yowis Ben 2 (2019)
- Melodylan (2019)
- Dignitate (2020)
- Yowis Ben 3 (2021)
- Balada Si Roy



KOPI DAN KESEHATAN

KOPI mungkin berperan dalam meningkatkan metabolisme tubuh dan mengurangi nafsu makan seseorang, tetapi minuman ini ternyata belum tentu membantu menurunkan berat badan.

Pakar nutrisi di Perth, Australia, Dr Shyamala Vishnumohan seperti disiarkan LiveScience pada akhir pekan lalu mengatakan, manajemen berat badan jauh lebih kompleks daripada menyeruput secangkir kopi dan menghilangnya lemak dalam tubuh.

Penelitian menunjukkan kafein dapat mengurangi nafsu makan sehingga berpotensi mengakibatkan seseorang makan lebih sedikit kalori. Tetap, meskipun kopi dapat sedikit mengurangi hormon ghrelin, Vishnumohan tak yakin seberapa signifikan efek penekan nafsu makan itu.

Misalnya, satu studi di International Journal of Food Sciences and Nutrition menemukan minum kopi sebelum makan sedikit menurunkan asupan kalori. Tetapi efek penekan nafsu makan tidak bertahan lebih dari tiga sampai empat jam.

Satu studi di Obesity menunjukkan peserta dengan kelebihan berat badan yang mengonsumsi kopi mengurangi asupan kalori mereka saat makan berikutnya.

Namun percobaan lain dalam Appetite menyimpulkan kopi tidak berpengaruh pada jumlah kalori yang dikonsumsi seseorang.

Para ahli tidak sepenuhnya memahami mekanisme di balik pengurangan ghrelin tetapi satu

penelitian kecil di Journal of American College of Nutrition mengumumkan hasil yang mengejutkan.

Mereka menemukan kopi tanpa kafein lebih menekan nafsu makan ketimbang kopi berkafein. Walau begitu, diperlukan lebih banyak penelitian untuk memahami sepenuhnya hal ini.

"Asupan kopi mempercepat metabolisme, kemungkinan karena kandungan kafeinnya. Ini meningkatkan pembakaran lemak melalui peningkatan termogenesis (produksi panas) dan stimulasi neurotransmitter seperti adrenalin," kata, pakar diet Lon Ben-Asher.

Satu percobaan kecil 2017 di Clinical Physiology and Functional Imaging menemukan kombinasi kopi dan olahraga meningkatkan proses pemecahan lemak. Namun penelitian ini berskala kecil sehingga masih membutuhkan lebih banyak penelitian.

Peneliti mengingatkan, orang-orang jangan tergoda minum kopi berlebihan karena ada efek samping yang tidak diinginkan, termasuk kegelisahan dan detak jantung yang berdebar kencang.

Penelitian lain

Sementara itu, minum dua hingga tiga cangkir kopi sehari dikaitkan dengan kemungkinan hidup lebih lama, demikian menurut studi baru para peneliti di Australia.

Para peneliti seperti disiarkan Insider, menganalisis data dari 450.000 orang di Biobank Inggris, yang diamati selama sekitar 12,5 tahun.

Mereka menemukan, peminum kopi bubuk 27 persen lebih kecil kemungkinannya untuk meninggal lebih awal dibandingkan dengan bukan peminum kopi.

Peminum kopi instan dan tanpa kafein memiliki kemungkinan kematian dini 11 persen dan 14 persen lebih rendah.

Menurut studi, orang yang minum dua hingga tiga cangkir kopi, apa pun

jenisnya, juga lebih kecil kemungkinannya terkena penyakit kardiovaskular.

Sementara peminum kopi berkafein memiliki kemungkinan sedikit lebih rendah terkena aritmia atau detak jantung tidak teratur (ant)



FENOMENA SOLTIS DAN LARANGAN KELUAR RUMAH

LARANGAN tidak boleh keluar rumah saat malam tanggal 21 Desember 2022 kini tengah viral di TikTok. Hal ini dikaitkan dengan fenomena solstis yang akan terjadi pada Rabu, 21 Desember 2022.

Apa yang dimaksud dengan fenomena solstis tersebut? Benarkah fenomena tersebut sangat berbahaya hingga tidak disarankan keluar rumah, khususnya pada malam hari?

Melansir dari Earth Sky, semua orang seluruh dunia tahu bahwa jalur matahari melintasi langit, panjang siang hari, dan lokasi matahari terbit dan terbenam semuanya bergeser secara teratur sepanjang tahun.

Tapi hari ini, titik balik matahari akan bergerak secara berbeda. Ini disebabkan oleh kemiringan sumbu Bumi dan oleh gerakan orbitnya mengelilingi matahari.

Kemiringan ini menyebabkan Belahan Bumi Utara dan Selatan saling bertukar tempat dalam menerima cahaya dan kehangan matahari

secara langsung. Akibat kemiringan inilah, yang menyebabkan terjadinya musim dingin dan musim panas.

Siang hari yang paling lama dinamakan Summer Solstice karena siang hari akan lebih lama dibandingkan dengan malam harinya. Sementara siang hari yang paling sebentar disebut Winter Solstice, pada hari itu malam hari akan lebih lama dibandingkan siang harinya. Karena, ada dua belahan Bumi, maka waktu solstis nya juga berbeda.

Di belahan Bumi bagian utara, summer solstice terjadi di bulan Juni. Saat itu kutub utara ada di posisi menghadap ke Matahari. Karena itu, sinar matahari jadi menyinari Bumi bagian tersebut lebih lama. Sedangkan winter solstice di kutub utara terjadi bulan Desember. Saat ini, kutub utara ada di posisi paling jauh dari Matahari. Maka hari itu jadi hari tergelap atau waktu malamnya lebih banyak.

Sebaliknya, di Bumi bagian selatan, summer solstice terjadi bulan

Desember. Hal itu karena posisi terdekat kutub selatan dengan matahari justru ada di bulan Desember. Kemudian winter solstice terjadi di bulan Juni, ketika posisi kutub selatan paing jauh dari Matahari. Negara yang mengalami kebalikan ini misalnya Australia dan Selandia Baru yang mengalami musim panas di bulan Desember.

Alih-alih berfokus pada waktu matahari terbenam atau matahari terbit, kuncinya ada pada apa waktu matahari mencapai titik tertingginya dalam perjalanannya melintasi langit.

Tak perlu khawatir

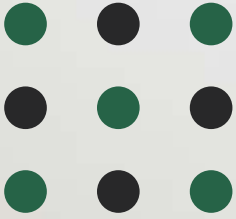
Sebenarnya masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir dengan fenomena solstis. Karena fenomena solstis yang terjadi pada 21 Desember menandai hari terpendek di Belahan Bumi Utara (hari pertama musim dingin) dan hari terpanjang di Belahan Bumi Selatan (hari pertama musim panas).

“Tidak peduli di mana Anda tinggal di dunia Bumi – tidak peduli jam berapa itu terjadi untuk Anda – titik balik matahari adalah sinyal Anda bahwa terjadinya perubahan musim,” dikutip Earth Sky pada Jumat (16/12/2022).

Sebagai informasi, pada awal Desember, siang matahari yang sebenarnya datang hampir 10 menit lebih awal menurut jam daripada di titik balik matahari sekitar tanggal 21 Desember. Dengan siang hari yang sebenarnya datang kemudian di titik balik matahari, demikian juga waktu matahari terbit dan terbenam.

Perbedaan antara waktu jam dan waktu matahari inilah yang menyebabkan matahari terbenam paling awal di belahan bumi utara dan matahari terbit paling awal di belahan bumi selatan mendahului titik balik matahari bulan Desember. Setelah fenomena solstis selesai, maka matahari akan bergerak ke utara lagi (bisnis)





LIMA KIAT PENGATURAN DIET CEGAH DIABETES



AHLI gizi dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Dr. Rita Ramayulis, M. Kes, DCN membagikan lima kiat pengaturan pola makan atau diet yang dapat diterapkan sehari-hari untuk mencegah seseorang mengalami diabetes.

“Bagaimana yang harus kita lakukan? Bagi kita yang belum terkena ataupun bagi masyarakat yang belum terkena (diabetes), maka tips pertama dengan melihat hal terkait dengan frekuensi makan,” kata Rita yang juga merupakan Ketua Indonesia Sport Nutritionist Association (ISNA) mengutip Antara.

Kiat pertama yaitu merencanakan jam makan untuk sehari dan tidak lagi mengandalkan rasa lapar ataukah tidak lapar. Merujuk pada penelitian yang dia himpun, Rita mengatakan jam makan dalam sehari dapat dibagi menjadi frekuensi lebih sering atau 5-6 kali sehari dari total kebutuhan kalori individu.

“Dikatakan bahwa orang yang makan dengan kebutuhan (misalnya) 2000 atau 1500 kalori sesuai kebutuhan sehari namun dikonsumsi dengan beberapa kali waktu makan dengan frekuensi yang lebih sering, ternyata memiliki kadar glukosa darah yang relatif lebih stabil dibandingkan dengan yang hanya makan (dengan frekuensi) dua atau tiga kali sehari,” kata Rita.

Namun, dia mengingatkan

masyarakat saat ini masih beranggapan bahwa yang disebut dengan makan ialah dalam proporsi dalam piring besar. Padahal sesungguhnya, makan berarti memasukkan zat gizi ke dalam mulut. Dengan begitu, misalnya, seseorang yang makan omelet telur saja atau minum segelas susu saja di pagi hari sudah bisa dikatakan makan sarapan.

“Dengan diatur pola makan dan sama dari hari ke hari secara konsisten (dengan frekuensi sering), terbukti ampuh untuk membuat kadar glukosa darah itu berfluktuasi baik. Dan ini tentu akan menurunkan risiko hipo ataupun risiko hiper (glukosa) yang dua-duanya sama berbahayanya,” kata Rita.

Kiat selanjutnya yaitu merencanakan jumlah karbohidrat pada setiap jam makan. Caranya dengan mengeliminasi atau memangkas jumlah sumber karbohidrat tinggi dan tidak mengandung zat yang tidak dibutuhkan individu.

“Contohnya roti putih. Semula kita makan dua, kita bisa potong separuh. Jadi kita makannya separuh. Untuk kenyangnya, kita akan cari dari sumber serat yang bisa memberikan rasa kenyang,” kata dia.

Rita mengatakan kiat eliminasi atau pemangkasan tersebut merupakan upaya untuk membuat jumlah karbohidrat lebih sedikit

walaupun berdampak pada rasa kelaparan seperti ada jam makan yang belum terpenuhi. Oleh sebab itu, kiat berikutnya yaitu terkait asupan serat dapat menyeimbangkan kebutuhan dari rasa lapar.

Dia menjelaskan peningkatan asupan serat pada menu harian dapat bermanfaat untuk mendapatkan fluktuasi glukosa dalam darah yang relatif lebih stabil.

Rita menawarkan cara agar serat harian dapat tercukupi dengan cara isi separuh piring makanan dengan sayuran terutama sayuran tipe A yang tidak mengandung karbohidrat sama sekali namun tetap memberikan rasa kenyang serta kaya serat, vitamin, dan mineral dan contohnya seperti timun, tomat, jamur kuping, labu air, selada, lobak, oyong, dan seterusnya.

Dia juga mengingatkan dalam satu porsi piring sebaiknya makanan pokok dikombinasikan atau dimodifikasi yang tidak lagi berfokus roti dan nasi saja, melainkan juga bisa dengan kentang, jagung, ubi merah, ataupun singkong yang merupakan jenis makanan pokok yang lebih berserat.

Selain itu, lauk juga harus

berimbang antara protein hewani dan nabati serta jangan lupa konsumsi buah secara utuh atau bukan dalam bentuk jus dan jika memungkinkan disarankan konsumsi beserta dengan kulitnya.

Kemudian, kiat lain yaitu memilih makanan pokok dengan indeks glikemik lebih rendah seperti kentang, jagung, dan ubi yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Kiat terakhir yaitu memodifikasi asupan lemak dengan cara meningkatkan asupan lemak tidak jenuh dan menurunkan asupan lemak jenuh. (Ist)



Tak Ada Titik Temu,(dari hal 1)

KETUA Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, menyampaikan bahwa dalam mediasi itu pihaknya telah menyampaikan harapan mereka dan sejumlah poin yang mereka anggap penting, begitu pula KPU RI, guna mencapai titik temu. "Hari ini ini kita belum capai titik temu tersebut. Insya Allah kita akan lanjutkan ke mediasi hari kedua besok jam 10.00," ucap Ridho.

"Tadi disampaikan oleh pimpinan KPU bahwa untuk menyampaikan apa yang sudah disampaikan Partai Ummat ini, untuk dicari titik-titik temu tersebut, harus diplenokan," imbuhnya.

Ketua Tim Advokasi Hukum Partai Ummat, Denny Indrayana, mengaku tak bisa membeberkan lebih jauh substansi dalam mediasi. Sebab, mediasi digelar tertutup. "Kami bisa dianggap keluar dari kesepakatan bahwa itu adalah forum yang tertutup," ujarnya dalam kesempatan yang sama. Ia mengklaim bahwa KPU "butuh waktu" untuk membahas pembicaraan dalam mediasi tersebut dengan internal mereka.

Sementara itu, perwakilan KPU RI sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, Mochamad Afifuddin, tak menjelaskan isi pembahasan yang menyebabkan mediasi perdana ini berlangsung singkat dan gagal mencapai titik temu. "Ya enggak boleh dong itu ditanyakan di sini," ujar Afif. "Kita mediasi lagi. Mediasi kan bisa 2 kali, 2 pertemuan lah. Intinya mau dilanjutkan besok," tambahnya.

Mediasi ini merupakan imbas dari gugatan sengketa verifikasi faktual yang dilayangkan Partai Ummat imbas dinyatakan tak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 oleh KPU RI. Sebagai informasi, mediasi merupakan amanat ketentuan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Permohonan sengketa Partai Ummat telah diterima Bawaslu RI, Jumat (16/12/2022) serta pada hari yang sama Bawaslu RI menyatakan permohonan lengkap dan memenuhi syarat. Gugatan ini diregister dengan nomor 006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022.

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik mengatakan, KPU sudah melakukan konsolidasi menghadapi gugatan sengketa ini dengan 2 KPU provinsi dan 16 KPU kabupaten/kota tempat Partai Ummat dianggap tak memenuhi syarat keanggotaan pada tahap verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2024.

Di Sulawesi Utara, keanggotaan Partai Ummat disebut hanya memenuhi syarat di 1 kabupaten/kota, dan tidak memenuhi syarat di 11 kabupaten/kota. Di NTT, keanggotaan Partai Ummat disebut hanya memenuhi syarat di 12 kabupaten/kota, dan tidak memenuhi syarat di 5 kabupaten/kota lainnya.

"Lima KPU kabupaten/kota (di NTT itu) yaitu Kupang, Alor, Sumba Barat, Lembata, dan Sabu Raijua," ujarnya. "Dan kedua, KPU Sulawesi Utara beserta 11 KPU kabupaten/kota yaitu Bolaang Mongondow, Minahasa,



Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan mediasi kepada Partai Ummat dan KPU RI di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (19/12/2022). (Foto--istBawaslu)

Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu," pungkas Idham.

Sementara itu, sebelumnya, Denny Indrayana menganggap keputusan KPU RI tidak adil dan keliru. Dalam gugatan sengketa ini, Denny mengklaim pihaknya membawa dokumen setebal 114 halaman. "Dalam permohonan tersebut, kami menguraikan secara detail dan rinci mengapa Partai Ummat seharusnya lolos dan layak dijadikan peserta Pemilu 2024," ujar Denny dalam jumpa pers.

"Diajukan juga bukti-bukti baik berupa dokumen hukum Partai Ummat, maupun bukti keanggotaan Partai Ummat, termasuk KTP, KTA dan video yang membuktikan kelayakan Partai Ummat untuk diloloskan dalam verifikasi faktual," tambahnya. Ia menambahkan, Partai Ummat melengkapi gugatan ini dengan 57 alat bukti, termasuk di dalamnya 16 flashdisk yang diklaim mewakili 6.000-an bukti yang dihimpun mereka.

PAN Bisa Untung atau Buntung

Di sisi lain, Lembaga survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) menyebutkan, tak lolosnya Partai Ummat sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan hal positif bagi Partai Amanat Nasional (PAN). Sebab, dengan begitu, suara PAN tidak akan tergerus oleh Partai Ummat.

Direktur Riset SMRC Deni Irvani awalnya membahas mengenai turunnya suara PAN dari 6,8 persen ke 1,7 persen. "PAN ini turun dari 6,8 (Pemilu 2019) ke 1,7 persen. Turun yang cukup besar," ujar Deni, seperti dilihat dalam akun YouTube SMRC.

Namun, Deni mengingatkan bahwa perolehan suara yang kecil juga pernah PAN alami jelang Pemilu 2019. Saat itu, elektabilitas PAN hanya ada di kisaran 1 persen. Walau begitu, PAN bisa melalui Pemilu 2019 dengan baik. "Pernah 1 persen juga PAN, kemudian ternyata cukup baik di masa kampanye," ucap dia.

Selanjutnya, Deni mengomentari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak meloloskan Partai Ummat sebagai peserta Pemilu 2024. Deni mengatakan, tak lolosnya Partai Ummat menguntungkan PAN. "Buat

PAN tentu saja itu hal yang positif karena Partai Ummat kemungkinan kalau bisa ikut pemilu itu akan menggerus pemilih PAN," ujar Deni. "Dengan tanpa ada Partai Ummat, PAN akan kembali seperti sedia kala, setidaknya kembali ke posisi 2019 menjadi peluangnya terbuka kembali," kata dia.

Terpisah, Pengamat politik Ujang Komarudin melihat gugatan Partai Ummat ke KPURI sulit mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan Amien Rais Cs. "Saya lihat kemungkinan akan ditolak, akan digugurkan, atau ya intinya gugatannya tidak akan berhasil. Kita tunggu saja," kata Ujang.

Namun meski begitu Ujang mengaku tidak mau mendahului proses hukum yang berlaku. Sehingga menurutnya semua pihak lebih baik menunggu dan mengikuti bersama bagaimana tahapan gugatan Partai Ummat ini ke depannya.

"Kalau persoalan hukum terkait gugatan hukum Ummat di Bawaslu saya tidak mencampuri karena itu urusan Bawaslu, sejauh mana potensi peluang atau gugatan partai Ummat itu tunggu saja, saya tidak mau mendahului proses hukum di Bawaslu," jelasnya.

"Semuanya perlu ditunggu dan Partai Ummat perlu memberikan atau membeberkan atau membuka fakta-fakta atau bukti-bukti seandainya penggalan itu dilakukan secara

sistematis," tambahnya.

Lebih lanjut kata Ujang, misalnya gugatan Partai Ummat diterima oleh Bawaslu dan pihaknya punya banyak bukti yang menguatkan, serta KPU terbukti melakukan kecurangan, hal ini nantinya akan berimbas kepada kepercayaan masyarakat.

"Kalau faktanya ada kecurangan berarti bermasalah dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Ini soal integrasi dan soal independensi dari pihak penyelenggara pemilu. Kalau ini terjadi, kepercayaan rakyat akan runtuh terhadap KPU," tegasnya.

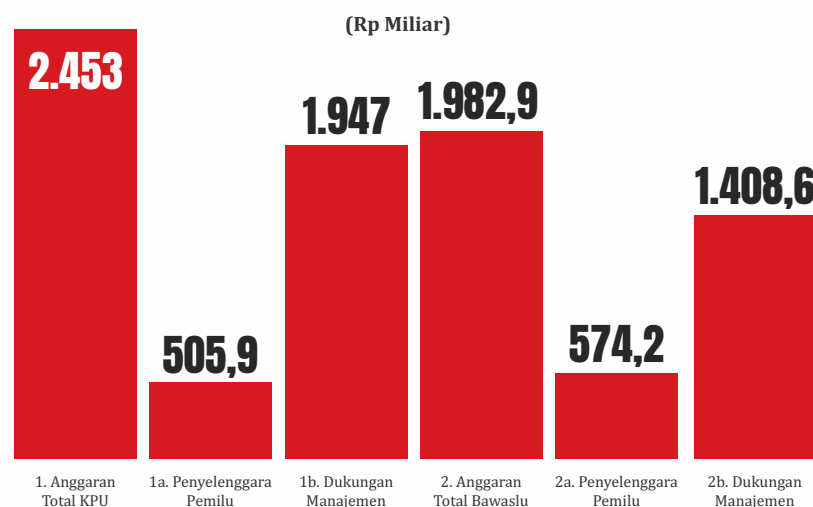
Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi membuka pintu bagi mantan kadernya yang sempat bergabung di Partai Ummat untuk kembali lagi. Para mantan kader PAN di Partai Ummat masih memiliki kesempatan untuk mengikuti Pemilu 2024. Ajakan tersebut disampaikan lantaran Partai Ummat tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024. Partai besutan Amien Rais itu sedang mengajukan gugatan ke Bawaslu atas kegagalan tersebut.

"Jika saudara saya yang dulu pernah aktif di PAN, lalu berpindah ke Partai Ummat, jika beliau-beliau memiliki rencana untuk bergabung kembali ke PAN, tentu kami akan sangat senang dan bergembira menerima saudara kami, pulang ke rumah besar untuk bersama-sama berjuang di PAN," kata Viva Yoga.

Viva menilai setiap keputusan yang dibuat oleh KPU termasuk dalam proses verifikasi partai politik adalah yang terbaik. Hal itu dikarenakan KPU diatur oleh undang-undang dan diawasi oleh publik dalam setiap pekerjaannya. "PAN menghormati eksistensi KPU yang bersifat nasional, mandiri, dan menjadi lembaga yang berintegritas," ujar Viva. "Karena KPU dibentuk oleh Undang-undang, yakni di UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, maka KPU wajib tunduk dan patuh kepada Undang-undang," imbuhnya.

Hingga saat ini, setidaknya tercatat ada 4 mantan kader PAN di Partai Ummat selain Amien Rais. Di antaranya adalah Fauzi Kadir, Buhari Kahar Muzakkar, Nazarudin dan Sugeng.(wid,rls,ant,ist/dya)

ANGGARAN KPU DAN BAWASLU DALAM APBN 2022



Audiensi bersama Perwakilan Nelayan Pulau Masalembu Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim Bahas Jaring Cantrang hingga Ketersediaan BBM



Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur (baju putih) tengah memberikan paparan saat audiensi dengan perwakilan nelayan Pulau Masalembu di Ruang Rapat Nautica DKP Jatim, Selasa (6/12/2022).

SURABAYA-Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengadakan Audiensi dengan perwakilan nelayan Pulau Masalembu di Ruang Rapat Nautica DKP Jatim, Selasa (6/12/2022). Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dr. Muhammad Isa Anshori, ATD. MT.

Stakeholder yang turut hadir yaitu Komandan Lantamal V Surabaya, Direktur Polairud Polda Jatim, Komandan Lanal Batuporon, Dinas Perikanan Kab. Sumenep, Pertamina Wil. Jatim, dan Kelompok Nelayan Rawatan Samudera Kecamatan Masalembu.

Pada pertemuan ini nelayan Pulau

Masalembu menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di wilayahnya. Antara lain penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan (jaring cantrang) dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan.

Terkait alat tangkap cantrang, DKP Jatim telah melakukan sosialisasi di Kabupaten/Kota berpesisir terkait peralihan alat tangkap cantrang menjadi jaring tarik berkantong (JTB). Hal ini juga telah diatur pada Permen KP nomor 18 tahun 2021 terkait peralihan alat tangkap cantrang dan jalur penangkapan ikan. Pihak DKP Jatim melalui Bidang Tangkap Seksi Sumberdaya Ikan juga telah

melaksanakan konsultasi dengan Balai Besar Penangkapan Ikan (BPPI) Semarang terkait wacana penerapan peralihan di wilayah Jawa Timur.

Penerbitan izin atas alat tangkap JTB di beberapa kabupaten seperti Probolinggo, Pamekasan, Sumenep dan Tuban merupakan bukti konkret keseriusan dan komitmen DKP Jatim dalam mengawal peralihan alat tangkap cantrang ini. Kedepannya akan dilaksanakan penerbitan ijin di beberapa kabupaten/kota mayoritas kapal-eks-cantrang.

Data yang dihimpun oleh DKP Jatim menunjukkan bahwa terdapat 7 pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di

Kabupaten Sumenep, sedangkan untuk total jumlah armada perikanan Kabupaten Sumenep adalah 3.520 armada dengan rincian 3.520 kapal dengan ukuran 0-5 GT dan 131 kapal dengan ukuran 6-10 GT. Sedangkan jumlah kebutuhan BBM subsidi per tahunnya untuk Kabupaten Sumenep adalah 8.562.816 Liter. DKP Jatim juga telah mengajukan usulan kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan tahun 2023.

DKP Jatim bersinergi dengan seluruh pihak untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan membangun fasilitas pengawasan, penambahan armada pengawasan, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan.(ADV)

Soal RUU ASN, DPR Benarkan Pasal Pensiunkan Dini PNS Secara Massal

JAKARTA - Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional pembahasan 2023. Salah satu yang menjadi sorotan adalah ada pasal mengatur pensiun dini massal ASN.

Pensiun dini massal bagi para PNS dan PPPK itu diatur dalam pasal 87 ayat 5 RUU usulan DPR yang telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) 2023 itu. Ayat 5 ini menjadi aturan tambahan dari UU ASN sebelumnya.

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan, meski sudah termuat dalam draf RUU itu, belum ada rincian lebih lanjut faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pemerintah

bisa melakukan pensiun dini massal itu. Sebab, pembahasannya kata dia baru akan dilakukan pada masa sidang tahun depan. "Masa sidang depan Insya Allah akan dibahas," kata Mardani, Senin (19/12/2022).

Pasal 87 ayat 5 itu berbunyi dalam hal perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini dilakukan secara massal, pemerintah sebelumnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR berdasarkan pada evaluasi dan perencanaan pegawai.

Menurut Mardani, pasal itu nantinya tidak akan menjadikan pemerintah semena-mena melakukan pensiun dini bagi para ASN. Ada sejumlah indikator yang akan diperhatikan para

anggota dewan saat diajak konsultasi oleh pemerintah seperti, kesejahteraan ASN itu sendiri hingga keberlanjutan tugas dan fungsi yang ditinggalkan. "Mesti dicermati dengan seksama. Tidak boleh ada kekosongan petugas dan tidak berlanjutnya estafet tugas. Plus mesti dijaga sisi kesejahteraan PNS," kata Ketua DPP PKS ini.

Pasal 87 sendiri membahas secara keseluruhan tentang pemberhentian ASN. Pasal 87 Ayat 1 menegaskan bahwa PNS bisa diberhentikan secara hormat jika ada perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini.

Kemudian, PNS bisa diberhentikan dengan hormat jika dianggap tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak

dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Lebih lanjut, Pasal 87 Ayat 2 mengatakan PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Kemudian, Ayat 3 menegaskan PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. Sementara itu, Ayat 4 pasal itu mengatur mengenai sejumlah aspek yang bisa menyebabkan para ASN diberhentikan dengan tidak hormat. (wid,rls,ist/dya)